

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

(Studi Kasus Di Kelurahan Delapan Ilir Kota Palembang)

Refalgi Albar, Syamsudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: *refalgialbar@gmail.com, syam.cinde@gmail.com*

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan instrumen penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga miskin di Kelurahan 8 Ilir. Dalam memastikan bahwa PKH berfungsi secara efektif sebagai alat pengentasan kemiskinan, penting untuk memahami bagaimana program ini diterapkan dalam praktiknya dan dampaknya terhadap keluarga penerima manfaat. Selain itu, perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat seiring berjalannya waktu juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kelurahan 8 Ilir Kota Palembang.

Jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni salah satu prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari seseorang serta perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Delapan Ilir belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator (1) Komunikasi (*Communication*) (2) Sumber Daya (*Resources*) (3) Disposisi dan (4) Struktur birokrasi. Faktor Penghambat nya ialah, dimana dapat terjadi disetiap tahap Implementasi pemahaman masyarakat yang masih kurang, jarak tempuh lokasi pendamping jauh sehingga kurang maksimal dan adanya kecemburuan sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; PKH; Kemiskinan.

Abstract

PKH is an important instrument that contributes to improving the quality of life of poor families in Kelurahan Eight Ilir. However, to ensure that PKH functions effectively as a poverty alleviation tool, it is important to understand how this program is implemented in practice and its impact on beneficiary families. In addition, economic and social changes Changes that occur in society over time must also be considered. Therefore, the aim of this research is to examine the implementation of the Family Hope program. in Subdistrict 8 Ilir, Palembang City.

This study used descriptive qualitative research, one of the procedures that produced descriptive data in the form of words both in writing and verbally from someone and observed behavior. Data collection techniques were observation, interviews with a number of informants.

The results showed that the Implementation policy of the Hope Family Program in Enrekang District had not been fully implemented optimally in accordance with its objectives, this was seen from the indicators (1) Communication (2) Resources (3) Disposition and (4) Bureaucratic structure. Inhibiting and Supporting Factors, which could occur at any stage Implementation of people's understanding was still lacking, the distance of the location of the remote companion so that it was less than optimal and the existence of social jealousy in the community.

Keywords: Implementation Policy; PKH; Poverty.

A. Latar Belakang

Penegakan Permasalahan kemiskinan timbul adanya masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai cukup kesempatan, kapasitas untuk menggapai taraf hidup yang layak, sehingga mengharuskan mereka untuk mengakui kemampuan kelompok lain. penghidupan dan kepemilikan aset produktif, mereka semakin tertinggal. Komunitas miskin sering kali memiliki kapasitas kewirausahaan yang rendah dan akses informasi yang terbatas, sehingga mereka tertinggal jauh dibandingkan komunitas lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih sangat berbahaya dan tersebar luas di banyak negara, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan merupakan tanggung jawab negara dan harus segera diselesaikan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Kemiskinan ialah suatu keadaan Di tempat tertentu atau di dalam suatu komunitas, ada individu atau kelompok masyarakat yang tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang layak. Pendekatan yang diterapkan oleh BPS dan beberapa negara lainnya disebut sebagai Pendekatan

Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*), di mana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa pangan maupun kebutuhan non-pangan, yang diukur melalui aspek pengeluaran.

Menurut Soerjono Soekanto kemiskinan diartikan keadaan dimana sekelompok masyarakat ketidakmampuan untuk mengurus diri sendiri. Mengingat standar hidup suatu kelompok, tidak mungkin juga menggunakan kapasitas mental dan fisiknya dalam kelompok sosial tersebut.

Menurut Friedman mengatakan bahwa kemiskinan adalah ketimpangan kesempatan yang menjadi dasar Daya sosial, melibatkan sumber daya seperti aset (tanah, properti, peralatan, dan kesehatan), serta sumber daya finansial (pendapatan dan kredit yang memadai).

PKH digunakan untuk mendukung kebijakan jaminan sosial bagi rumah tangga yang sangat miskin (RTSM). Program ini bertujuan melindungi masyarakat miskin agar dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Dalam jangka pendek, PKH diharapkan dapat meringankan beban RTSM, sementara dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan

antargenerasi, sehingga generasi penerusnya tidak perlu mengalami kemiskinan.

PKH merupakan bagian dari Instrumen Penanggulangan Kemiskinan yang terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti Klaster I (Program dukungan sosial terpadu berbasis keluarga), Klaster II (Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat), dan Klaster III (Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Usaha Kecil). PKH termasuk dalam Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Kluster I), yang merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk membantu keluarga miskin menggunakan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut.

Manfaat PKH diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia, dengan tetap mempertahankan tingkat perlindungan sosial yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan bahwa PKH adalah program bantuan sosial bersyarat untuk masyarakat miskin yang terdaftar dalam data agregat program kesejahteraan sosial, dengan pengelolaan oleh Pusat Informasi dan Data Perlindungan Sosial.

Palembang merupakan kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera, dengan jumlah

penduduk yang mencapai 1,686 juta penduduk tercatat ada 119,24 ribu Jumlah penduduk miskinnya. Seorang dapat dikategorikan miskin apabila berada diambang atau di bawah garis kemiskinan, di tingkat nasional garis kemiskinan sebesar Rp 486.168 per kapita per bulan. Untuk di tingkat provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 457,455.00 per bulan, sedangkan untuk di Palembang sebesar Rp 567,518.00 per bulan. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan persentase penduduk miskin di Indonesia, Sumatera Selatan dan Palembang yang dapat dilihat dari grafik ini.

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Palembang yang telah terjadi dimulai pada 2018 sampai 2021 ini menunjukkan bahwa perlu usaha lebih bagi pemerintah untuk menekan angka tersebut. Kota Palembang merupakan sebuah kota yang memiliki penduduk yang banyak dengan jumlah 1,686 juta penduduk dan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kabupaten/kota yang berada di wilayah sumatera selatan. Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin di Kota Palembang dibandingkan dengan kota/kabupaten di Sumatera Selatan.

Melihat fenomena mengenai kemiskinan yang terjadi di Kota besar seperti di Palembang, perlu dilihat kembali sejauh mana

sebuah kebijakan mampu mengatasi sebuah permasalahan. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan membantu penduduk miskin agar dapat kelayakan hidup mereka.

Implementasikan PKH di Kota Palembang diharapkan mampu mengatasi permasalahan tingkat angka kemiskinan yang tinggi; meningkatkan taraf hidup dari penerima manfaat; mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan; merubah perilaku dan kemandirian; dan dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan pada keluarga miskin. Namun pada kenyataannya permasalahan yang ditemukan dilapangan terkait pelaksanaan PKH di Kota Palembang masih cukup serius seperti angka kemiskinan di Kota Palembang yang naik sejak tahun 2018 hingga 2021.

PKH merupakan instrumen penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga miskin di Kelurahan Delapan Ilir. Namun, untuk memastikan bahwa PKH berfungsi secara efektif sebagai alat pengentasan kemiskinan, penting untuk memahami bagaimana program ini diterapkan dalam praktiknya dan dampaknya terhadap keluarga penerima manfaat. Selain itu, perubahan ekonomi dan sosial Perubahan

yang terjadi di masyarakat seiring berjalannya waktu juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan program Keluarga Harapan. Di Kelurahan 8 Ilir Kota Palembang. Penelitian ini akan mencakup pemahaman tentang bagaimana program ini dilaksanakan ditingkat lokal, proses seleksi penerima manfaat, distribusi bantuan pak yang dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi potensi permasalahan atau hambatan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program ini.

Harapannya, temuan dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang berharga bagi pemerintah., pemangku kepentingan, dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Delapan Ilir. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi dan dampak program ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas PKH dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah ini. Disamping itu, relevansi dari penelitian ini juga terletak pada kontribusinya sebagai tambahan informasi mengenai pelaksanaan program sosial di tingkat lokal, yang dapat

menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dalam domain ini.

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan” (Studi Kasus di Kelurahan Delapan Ilir Kota Palembang).

B. Kajian Pustaka

B.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Kata “implementasi” berasal dari bahasa Inggris “*to Implement*,” yang artinya adalah mengimplementasikan. Lebih dari sekedar kegiatan, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, mengacu pada standar tertentu guna mencapai tujuan operasional secara optimal. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, implementasi didasarkan pada kegiatan, aksi, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Ini bukan sekedar kegiatan, tetapi juga merupakan kegiatan yang terencana dan ditujukan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut George Edward III seperti yang dikutip oleh Winarno (2008), implementasi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi dianggap sebagai

langkah politik yang berada di antara perumusan suatu rencana dan konsekuensi dari kebijakan tersebut terhadap mereka yang terlibat di dalamnya. Jika suatu rencana tidak mampu mengurangi permasalahan sesuai dengan tujuan kebijakan, maka pelaksanaannya dapat gagal meskipun dilakukan dengan baik. Sebaliknya, kebijakan yang baik pun dapat gagal jika implementasinya tidak dilakukan dengan baik.

Edwards III mengidentifikasi beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, termasuk:

1. Konsistensi

Sejauh mana implementasi sesuai dengan tujuan dan prinsip kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Kapasitas dan sumber daya

Apakah sumber daya yang cukup telah dialokasikan untuk mendukung implementasi kebijakan.

3. Partisipasi dan dukungan publik

Tingkat dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kebijakan dapat memengaruhi implementasi.

4. Koordinasi antar lembaga

Sejauh mana lembaga-lembaga pemerintah bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan.

5. Birokrasi

Kinerja birokrasi dalam menjalankan kebijakan dapat menjadi indikator penting.

6. Evaluasi dan pemantauan

Apakah ada mekanisme evaluasi dan pemantauan yang efektif untuk mengukur kemajuan implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip oleh Leo Agustino (2016:126) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang terjadi setelah pengambilan keputusan awal. Tindakan ini melibatkan usaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks usaha berkelanjutan, implementasi bertujuan mencapai perubahan besar yang telah ditetapkan atau diidentifikasi oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur

birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

B.2 Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Kinerja PKH atau Program Keluarga Harapan adalah suatu inisiatif perlindungan sosial yang digagas oleh pemerintah Indonesia, bertujuan utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan. dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Program ini menggabungkan pemberian bantuan finansial berkala dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. Berikut penjelasan lebih detail mengenai Program Keluarga Harapan:

1. Tujuan PKH:

- a. Meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi keluarga miskin dan rentan.
- b. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin dan rentan.
- c. Meningkatkan akses terhadap pangan dan gizi yang cukup bagi keluarga miskin dan rentan.
- d. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.

2. Penerima PKH:

- a. Subyek PKH adalah keluarga yang memenuhi kriteria tertentu yang

- ditetapkan pemerintah. Kriteria ini sering kali didasarkan pada tingkat pendapatan keluarga dan kondisi sosial ekonomi.
- b. Keluarga yang menerima manfaat adalah keluarga miskin atau berisiko tinggi jatuh miskin.
3. Bantuan Finansial Berkala:
- a. Penerima manfaat PKH menerima dukungan keuangan regular dalam bentuk uang tunai. Besaran bantuan finansial berbeda-beda tergantung kondisi keluarga dan daerah tempat tinggal.
 - b. Bantuan ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk membayar uang sekolah anak, membeli kebutuhan dasar, atau menerima layanan kesehatan.
4. Kewajiban penerima manfaat:
- a. Penerima manfaat PKH mempunyai kewajiban tertentu untuk melaksanakannya. Hal ini termasuk memastikan anak-anak mereka bersekolah dan berpartisipasi dalam program vaksinasi.
 - b. Selain itu, penerima manfaat harus berpartisipasi dalam program kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
5. Monitoring dan evaluasi:
- a. Program ini dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah untuk memastikan dukungan keuangan dialokasikan secara akurat dan efektif.
 - b. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur dampak program terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
6. Dampak jangka panjang:
- PKH mempunyai tujuan jangka panjang yaitu memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan.
- Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dan telah memberikan kontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan.
- Selain manfaat finansial, PKH juga berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

B.3 Definisi Kemiskinan

Niemietz (2011) dalam Maipita (2014) menyatakan bahwa kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan membeli kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Sementara menurut.

Badan Pusat Statistik (2016), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran. Kuncoro dalam Tyas (2016) menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan mencapai taraf hidup minimum. Dengan demikian, kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak dapat mencapai standar hidup minimum.

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) menyebutkan lima karakteristik masyarakat miskin, yang mencakup:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
- 2) Tidak mampu menghasilkan aset produksi secara mandiri.
- 3) Umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
- 4) Banyak di antaranya tidak memiliki akses ke fasilitas.
- 5) Sebagian besar anggotanya masih muda dan belum memperoleh keterampilan atau pendidikan yang memadai.

C. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menyajikan, mengklasifikasikan, menggambarkan, dan menganalisis permasalahan yang sedang terjadi saat ini dengan menggunakan pendekatan tertentu, seperti Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Mengumpulkan data deskriptif yang dapat menggambarkan secara rinci.

C.1 Jenis Data

Dalam Dalam penelitian ini, penulis memerlukan data untuk mendukung kegiatan dalam penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (pihak-pihak) dengan menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang diambil secara langsung dari subjek tersebut, melibatkan pihak seperti Dinas Sosial, Kepala Lurah, Pedamping PKH, dan Masyarakat Setempat sebagai sumber informasi.

b. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti media, buku, dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

C.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:225) yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.

- a. Teknik Observasi, Sutrisno Hadi (1990:136), observasi adalah kegiatan memperhatikan dan mencatat fenomena secara sistematis atau teratur dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap gejala yang diuji untuk memastikan keakuratan data selama proses wawancara.
- b. Teknik Wawancara, adalah Sugiyono (2016:231) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab, dengan maksud membangun makna terkait suatu topik tertentu. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dan terbuka kepada informan kunci atau pihak terkait yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik Dokumentasi merupakan Suharsimi Arikunto (1996:200) mendefinisikan Metode Dokumentasi

sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait suatu hal atau variabel melalui referensi catatan-catatan, buku, transkrip, dan sumber lainnya.

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH), yang sering disebut sebagai PKH, merupakan kebijakan pemerintah yang menyediakan bantuan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan tertentu.

Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang program PKH pada tahun 2006 dan menjalin kerjasama dengan Bank Dunia. Menurut laporan Bank Dunia (2006), terdapat empat alasan yang mendasari kebutuhan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan program PKH, yakni:

- a. Masih ada sekitar 6,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskinn (RTSM) yang hanya mempunyai rata-rata pendapatan Rp 130.000,00 perbulan.
- b. Masih tingginya kasus malnutrisi pada anak-anak Indonesia, dimana lebih dari

seperempat anak-anak usia 5 tahun mempunyai bobot badan yang berada dibawah standar dan juga masih banyak keluarga yang mengkonsumsi makanan rendah gizi.

- c. Tingginya tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia, kondisi tersebut disebabkan oleh memeriksakan kesehatan ibu hamil tidak secara teratur, lebih suka melahirkan melalui dukun beranak secara tradisional.
- d. Masih banyaknya anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar yaitu menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun (Suharto, 2012).

Program Perlindungan Sosial, juga dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfers (CCT), telah diimplementasikan sejak tahun 2007 dengan tujuan utama menanggulangi masalah kemiskinan di negara-negara yang melaksanakannya. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat ini bertujuan membuka akses bagi rumah tangga miskin, terutama dalam hal pemanfaatan layanan kesehatan dan pendidikan, khususnya untuk ibu hamil dan anak. Selain itu, PKH juga memberikan manfaat dan dorongan kepada penyandang

disabilitas dan lanjut usia agar dapat menjaga tingkat kesejahteraan sosial (Kemensos RI, 2019).

Lebih lanjut, pendamping PKH Kelurahan Delapan Ilir menyatakan bahwa PKH adalah program bantuan tunai langsung yang bersyarat dan ditujukan untuk keluarga miskin.

“PKH di Sumatera Selatan dilaksanakan pada tahun 2011, sedangkan di Kota Palembang pada tahun 2013 salah satunya yaitu PKH di Kelurahan Delapan Ilir dilaksanakan pada bulan Agustus dan programnya berjalan pada bulan Oktober. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan langsung tunai dan bersyarat yang ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong miskin dan bukan kelanjutan dari program BLT (bantuan langsung tunai)” (Herlina Agustina, Pendamping PKH).

Dengan ini, tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengembangkan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin dengan maksud meningkatkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang telah terjadi sebelumnya.

D.2 Partisipasi Pendamping PKH Kelurahan Delapan Ilir

Pendampingan menjadi sangat penting karena sebagian individu tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi rendah memerlukan individu yang dapat bertindak sebagai perwakilan untuk membantu mereka dalam mengadvokasi hak-hak mereka. Pendamping PKH menghabiskan sebagian besar waktu mereka di lapangan, termasuk mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok, mengunjungi dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan. Di samping itu, pendamping juga melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti membuat laporan, memperbarui dan menyimpan formulir, serta menjalankan kegiatan administrasi rutin lainnya. Sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan berikut ini:

“Pendamping mempunyai kewajiban mengurus anak PKH untuk menjadi lebih cerdas dan sehat, partisipasi ibu-ibu khususnya ya mas dalam pertemuan kelompok selalu mengarahkan dan mendidik anak-anaknya secara baik dan sehat. Kendalanya anak yang mendapat PKH yang cacat dari pendamping mengunjungi rumah, misal dibawa ke RS untuk periksa dan diantar” (Herlina Agustina, pendamping PKH).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa peran pendamping adalah membuat peserta PKH mengalami kemajuan sehingga kehidupan mereka dapat menjadi lebih baik di masa depan. Pandangan alternatif ini didasarkan pada wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya mas, salah satu tugas dari pendamping PKH untuk masyarakat penerima PKH adalah dalam pertemuan kelompok petugas pendamping biasanya memberikan sosialisasi berupa materi-materi yang berguna bagi masyarakat penerima PKH, serta pendamping PKH harus mencatat penerima PKH yang rajin dalam pertemuan kelompok dan yang tidak rajin”(Andri, penerima PKH).

Andri menyatakan bahwa peran pendamping PKH melibatkan penyampaian sosialisasi melalui materi-materi yang bermanfaat untuk keluarga penerima PKH dan pemantauan agar peserta PKH lebih aktif dalam menghadiri pertemuan bulanan. Perspektif yang berbeda diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau kewajiban dari pendamping itu mengadakan pertemuan kelompok, mendampingi, pemutaakhiran global. Namun pendamping PKH juga mengikuti pelatihan penyampaian FDS (Family Development Sation) dan juga materi PK2K disampaikan untuk warga. Semua pendamping lama sudah mengikuti pelatihan ” (Edi, Penerima PKH).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan pendamping PKH sangat signifikan bagi masyarakat penerima PKH, mulai dari pengelolaan program PKH hingga mencapai tingkat kemandirian. Menurut Edi Winarto, peran pendamping PKH melibatkan pendampingan langsung dan penyampaian materi PK2K kepada penerima manfaat PKH.

E. Penutup

E.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Delapan Ilir, dapat disimpulkan beberapa poin kunci:
2. Kendala di luar sistem PKH di Kelurahan Delapan Ilir mencakup fakta bahwa beberapa penerima yang sebenarnya mampu tidak melakukan graduasi mandiri dari program. Hal ini disebabkan oleh data calon penerima PKH yang diperoleh langsung dari Kementerian Sosial, sehingga petugas pendamping PKH tidak memiliki kewenangan untuk merubah data tersebut.

E.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

1. Meningkatkan program PKH yang sudah berjalan sesuai aturan, sehingga kedepannya berdampak lebih baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.
2. Pendamping PKH harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap SDM agar masyarakat penerima PKH yang sudah mampu dapat mengundurkan diri dari program PKH.
3. Masyarakat Penerima PKH harus bisa aktif dan kreatif untuk mencari maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan penerima PKH.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020. Cetakan Kesatu. Bandung:
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.
- Prijono, O.S. Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Alaf Riau.
- Surakhmad, Winarno. 1997. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito
- Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2. Nomor: 5 (Hal. 886-896). Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur.
- Claudia, A., & Fachrudin, A. (2017). *Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Bojong Sari Kota Depok*.
- Dillemath, A.W., dan Warshofsky, D.R. (2016). *“Empowering Collaborative Network in the Age of Complexity*. *Journal of Environmental Studies and Sciences*. Vol. 6. Nomor: 1: (23-33).
- Jurnal Otonomi Daerah Dan Pengembangan Masyarakat*, 15(2)
- Kholif, K., Noor, I., & Siswidiyanto. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 709–714.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 8(2).
- Chasanah, Uswatun dkk. (2021). *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru”*. *Jurnal*